

Kemenkop dan UKM Minta E-commerce Takedown Produk Pakaian Bekas Impor

Kemenkop dan UKM mengundang Asosiasi Indonesia (idEA) dengan beberapa marketplace yaitu Blibli, TikTok, hingga Tokopedia untuk membahas praktik penjualan bekas melalui marketplace. Deputi Bidang UKM Kemenkop dan UKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan salah satu yang dibahas dari pertemuan tersebut adalah meminta asosiasi untuk menutup atau produk-produk pakaian impor bekas yang dijual di e-commerce. "Teman-teman dari idEA komitmen untuk turut memberantas kegiatan ini dengan beberapa langkah tadi, sosialisasi, melakukan pengingatan kewajiban dari penjual untuk barangnya termasuk mengenai legalitas barang, dan melakukan tindakan dan blacklist kalau berkali-kali tidak bisa ditertibkan," kata Hanung, Kamis (16/3). Dalam 7 hari ke depan, Kemenkop dan UKM akan mengevaluasi langkah tersebut. Hanung akan meminta data berapa banyak jumlah produk penjual yang telah di- ehingga akan terpantau langkah konkret yang dilakukan pihak marketplace. "Kalau tidak ada progres kami akan diskusikan dengan (Kementerian) Perdagangan, kebijakan apa yang mesti diambil untuk menangani hal ini," ujar Hanung. Dari pantauan di Tokopedia, cukup mudah mencari pakaian bekas hasil impor. Cukup memasukkan kata 'kemeja impor' di pencarian, maka akan muncul beragam pilihan. Terlepas dari keaslian produk yang dijual, pakaian-pakaian yang dijual di Tokopedia tersebut dibanderol dengan harga miring. Salah satunya kemeja berbahan flanel pria bekas impor yang dijual seharga Rp 40.000 di Tangerang Selatan, lalu ditemukan juga kemeja bekas impor wanita seharga Rp 42.500 di Pekanbaru, juga ditemukan kemeja bekas impor pria seharga Rp 93.750 di Jakarta Selatan. Sama halnya dengan di Shopee, dengan memasukkan kata kunci 'celana impor', muncul banyak pilihan produk dengan harga miring. Celana outdoor bekas impor di Kabupaten Bandung dibanderol Rp 85.500, sementara celana jelas bekas impor di Jakarta Barat dijual cuma Rp 113.000. Wakil Ketua idEA, Budi Primawan, mengatakan pihaknya akan mengkomunikasikan hasil pertemuan hari ini dengan pihak penjual yang ada di marketplace. "Jadi kan memang kita selalu masing-masing platform akan berkomunikasi dengan penjual di tempat (marketplace) mereka. Akan diingatkan lagi

mereka. Jadi memang sudah ada aturannya," kata Budi. Budi juga menegaskan pihaknya akan melakukan sesuai arahan dari Kemenkop dan UKM. Menurutnya, langkah itu juga untuk kebaikan pelaku UMKM yang berjualan online di marketplace. "Dengan komunikasi ini, kita maunya si penjual lebih diedukasi sehingga bisa berjualan yang benar. Kita bukan mengawasi untuk menghukum, kita mengawasi untuk lebih baik," tutur Budi.